

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Disparitas perekonomian antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada daerah masing-masing. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Tingginya suatu disparitas tidak hanya menciptakan ketegangan sosial (*social strain*) tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan serta pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan disparitas pembangunan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2003).

Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan sampai ada gerakan protes dari tiap daerah dan memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu dan kekhawatiran akan adanya gerakan disintegrasi tersebut akhirnya memunculkan undang-undang yang memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab yang sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Otonomi daerah itu sendiri resmi dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari 2001. Tujuan diadakannya otonomi daerah adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi, stabilisasi nasional dan pemerataan pembangunan. Kebijakan otonomi daerah dicanangkan agar mendorong Pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing (Nugroho, 2003).

Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( UU RI Nomor 32 dan 33, 2004).

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber

daya dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ini hanya terkonsentrasi di daerah pusat saja dan kurang memperhatikan daerah pendukung. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah. Di negara yang sedang berkembang, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan wilayah. Campur tangan tersebut adalah pemerintah sebagai bentuk institusi merupakan sistem pengambil keputusan dan melahirkan aturan-aturan yang menyangkut alokasi sumber daya serta pemanfaatannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Secara awam dikatakan, perlu pendapatan yang tinggi untuk dapat mencapai kesejahteraan atau meningkatkan standar hidup masyarakat yang jumlahnya semakin meningkat. Persoalan pembangunan saat ini kiranya perlu melihat kondisi yang terjadi di berbagai wilayah, karena pada masing-masing wilayah terdapat beberapa karakteristik perbedaan dan tentu memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Pulau Jawa sebagai salah satu Pulau besar di Indonesia tidak mungkin terlepas dari masalah ketimpangan perekonomian. Pulau Jawa yang terdiri dari 6 (enam) Provinsi ini tentu saja memiliki berbagai persoalan-persoalan penting yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi

dan kesenjangan distribusi pembangunan. Aspek pemerataan pembangunan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

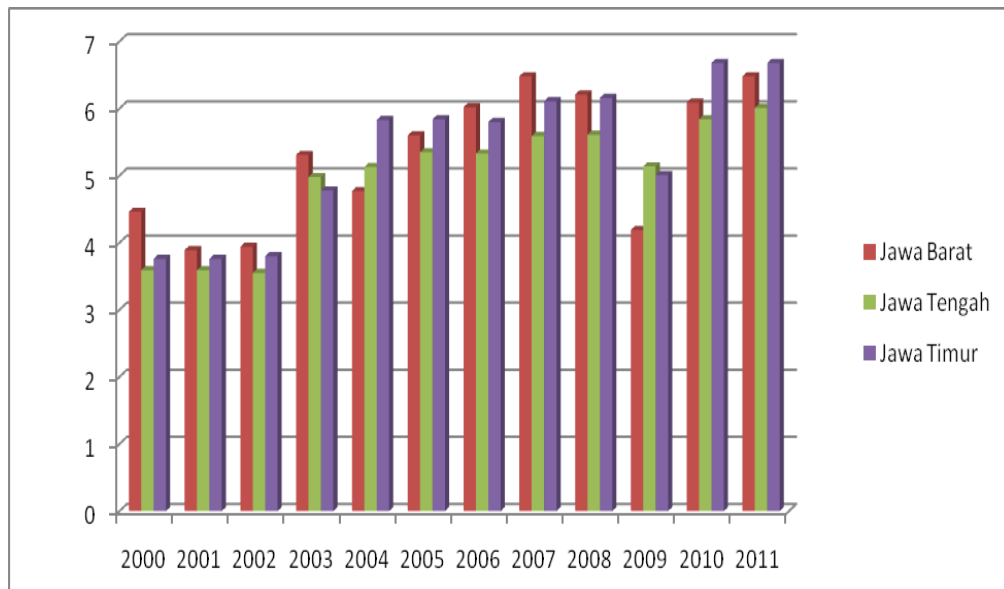
**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto di Wilayah Jawa ( Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) Periode 2000- 2011**

<b>Tahun</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>2000</b>	195.753.027	114.701.304	202.830.063
<b>2001</b>	203.369.000	118.816.400	210.448.570
<b>2002</b>	211.391.590	123.038.541	218.452.389
<b>2003</b>	220.965.314	129,166,462	228.884.459
<b>2004</b>	230.003.496	135,789,872	242.228.892
<b>2005</b>	242.883.882	143,051,213	246.374.727
<b>2006</b>	257.499.446	150,682,654	271.797.924
<b>2007</b>	274.180.307	159,110,253	288.404.312
<b>2008</b>	291.205.837	167 790 369	305.538.686
<b>2009</b>	303.405.251	176.673.456	320.861.168
<b>2010</b>	322.223.817	186.995.480	342.280.765
<b>2011</b>	343.111.243	198.226.349	366.984.301

Sumber : BPS (Indonesia dalam angka)

Seperti yang terlihat pada **Tabel 1.1** diatas bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan peningkatan jumlah PDRB dari masing-masing Provinsi di Provinsi. Dari tiga provinsi tersebut ternyata provinsi Jawa Tengah memiliki PDRB yang rendah bila dibanding dengan PDRB provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing provinsi berbeda. Kenyataan inilah yang menarik untuk dikaji, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan PDRB dan disparitas perekonomian di masing-masing provinsi tersebut.

**Gambar 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto di Provinsi ( Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%) Periode 2000 – 2011**



Sumber : BPS Indonesia dalam angka (diolah)

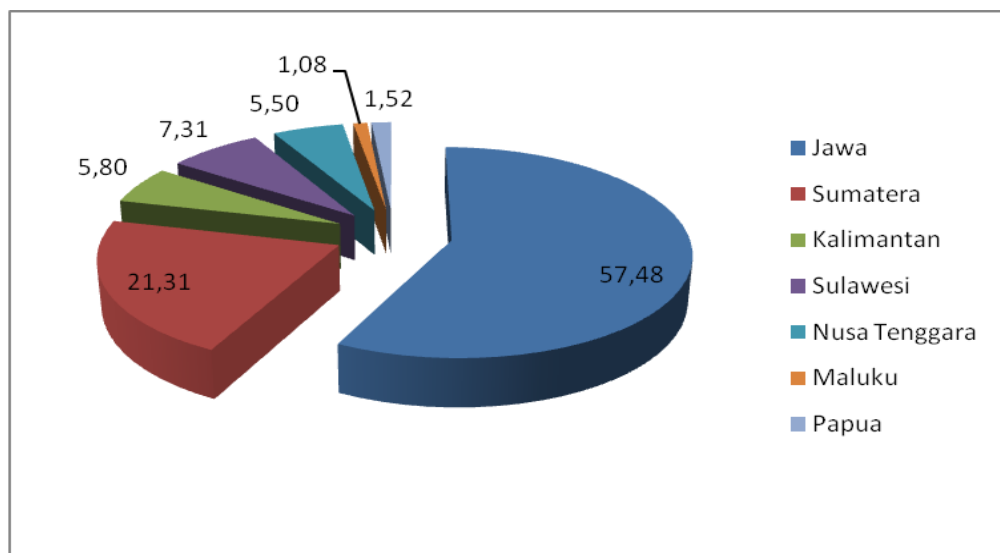
**Gambar 1.1** menunjukkan tingkat pertumbuhan PDRB di masing provinsi. Kenaikan dan penurunan pertumbuhan PDRB yang terjadi di tiga provinsi tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dalam bukunya (Arsyad, 2010) menyebutkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Negara) adalah Pertama, Pertumbuhan Penduduk (angkatan kerja) disertai lapangan pekerjaan akan meningkatkan output perekonomian. Kedua adalah Akumulasi Modal, pemilik modal akan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi sehingga akan meningkatkan output perekonomian. Ketiga, Kemajuan Teknologi, dan yang terakhir adalah Sumber Daya Institusi (sistem kelembagaan)

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Pertumbuhan

penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labour force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut berarti: (1) Semakin banyak jumlah angkatan kerja semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan (2) semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik (Arsyad, 2010).

Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak dibanding dengan Pulau lain di Indonesia (136,6 juta), dengan laju pertumbuhan penduduk 1,20% per tahun pada periode 2000-2010. Angka laju pertumbuhan penduduk ini lebih rendah dibandingkan angka laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 yakni sebesar 1,25% per tahun. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu ciri demografis Indonesia. Berikut data luas geografis beserta kepadatan jumlah penduduk.

**Gambar 1.2**  
**Distribusi Persentase Penduduk Tahun 2010**



Sumber : Data sensus penduduk 2010

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi**  
**berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 dan 2010**

Provinsi	Penduduk (ribu)		Laju pertumbuhan (%/tahun)	
	SP 2000	SP 2010	1990-2000	2000-2010
DKI Jakarta	8.361.079	9.588.198	0,13	1,39
Banten	8.098.277	10.644.030	-	2,79
D I Yogyakarta	3.121.045	3.452.390	0,72	1,02
Jawa Barat	35.724.093	43.053.732	1,10	1,89
Jawa Tengah	31.223.258	32.382.657	0,94	0,37
Jawa Timur	34.765.993	37.476.757	0,70	0,76
<b>Indonesia</b>	<b>205.132.458</b>	<b>237.556.363</b>	<b>1,40</b>	<b>1,49</b>

Sumber : BPS (Indonesia dalam angka)

Pertumbuhan suatu perekonomian juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Menurut (Todaro, 2000) pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan lebih menentukan didalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah.

Menurut (Mangkoesoebroto, 1998) peranan pemerintah yang harus dijalankan adalah :

- a. *Peranan alokasi*, yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya.
- b. *Peranan distribusi*, yaitu pemerintah melalui kebijakan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif, yaitu beban pajak yang besar bagi yang mampu dan mendistribusikan bagi yang kurang mampu.

- c. *Peranan stabilisasi*, yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah.

Keberadaan APBD yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi modal pemerintah daerah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini, sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

**Tabel 1.3**

**Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi ( Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) Dalam Lima Tahun Terakhir (Juta rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>2007</b>	6.964.665	4.794.746	6.855.218
<b>2008</b>	8.625.321	6.051.713	8.799.027
<b>2009</b>	10.243.087	6.380.478	9.888.941
<b>2010</b>	11.531.944	7.530.673	11.976.298
<b>2011</b>	9.924.710	6.252.150	10.765.886

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat disparitas perekonomian yang terjadi di Wilayah Jawa ( Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) periode 1996- 2011.



2. Apakah jumlah penduduk, tingkat laju pertumbuhan PDRB, dan APBD (*sisi pengeluaran pemerintah*) memiliki pengaruh terhadap tingkat disparitas perekonomian di Wilayah Jawa ( Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) periode 1996- 2011.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis :

1. Besarnya tingkat disparitas perekonomian di Wilayah Jawa ( Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) periode 1996- 2011.
2. Besarnya pengaruh jumlah penduduk, laju pertumbuhan PDRB, dan APBD (*sisi pengeluaran*) terhadap tingkat disparitas perekonomian di Wilayah Jawa ( Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) periode 1996- 2011.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Provinsi

Diharapkan menjadi tambahan informasi agar lebih memantapkan peran perencanaan pembangunan daerah di tahun-tahun mendatang.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan penerapan dari teori-teori akademis yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi , sekaligus sebagai tolok ukur pribadi tentang keilmuan yang diterima selama ini, dan juga sebagai tugas akhir yang merupakan syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait.

## E. METODE ANALISIS DATA

### 1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data diambil dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2011.

### 2. Metode Analisis Data

#### a. Indeks Williamson

$$IDW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 P_i}}{\bar{Y}}$$

**IDW** = Indeks kesenjangan Williamson

**Y<sub>i</sub>** = PDRB per kapita wilayah ke-i

**$\bar{Y}$**  = Rata-rata PDRB per kapita nasional, kawasan, pulau, provinsi, wilayah

**P<sub>i</sub>** =  $f_i/n$ , dimana Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-i dan  $n$  adalah total penduduk nasional, provinsi, pulau, atau kawasan.

Pengukuran didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar wilayah yang berupa besaran PDRB. Kriteria pengukuran

adalah, semakin besar nilai indeks yang menunjukkan variasi produksi ekonomi antar wilayah semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi dari masing-masing wilayah dengan rata-ratanya, sebaliknya semakin kecil nilai indeks akan menunjukkan pemerataan antar wilayah yang baik.

Nilai IDW terletak antara 0 sampai dengan 1, apabila nilai IDW mendekati 0 (nol), maka suatu wilayah dapat dikatakan merata dan apabila nilai IDW mendekati 1 (satu) berarti suatu wilayah ada ketimpangan.

#### **b. Ordinary Least Square (OLS)**

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan variabel-variabel yang mempengaruhi ketimpangan digunakan analisis regresi berganda Ordinary Least Square (OLS). Persamaan estimasi yang digunakan adalah :

$$IDW = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + U_t$$

Keterangan

IDW	: Nilai Indeks Williamson
X1	: Jumlah Penduduk (jiwa)
X2	: Perkembangan PDRB (Juta)
X3	: Pengeluaran Daerah (Juta)

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II Landasan Teori**

Dalam bab ini merupakan penjabaran dari teoristik yang terdapat pada usulan penelitian dan memuat materi-materi yang disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan pembahasan atas topik permasalahan.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini memuat identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan model penelitian.

### **BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, berdasarkan nilai indeks Williamson dan hasil analisis keterkaitan variabel berdasarkan Model Ordinary Least Square.

### **BAB V Penutup**

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV serta saran-saran yang perlu disampaikan.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**